

ANALISIS KINERJA BPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Moch. Ardiansyah (192020100079)

Nama Dosen Pembimbing

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2023

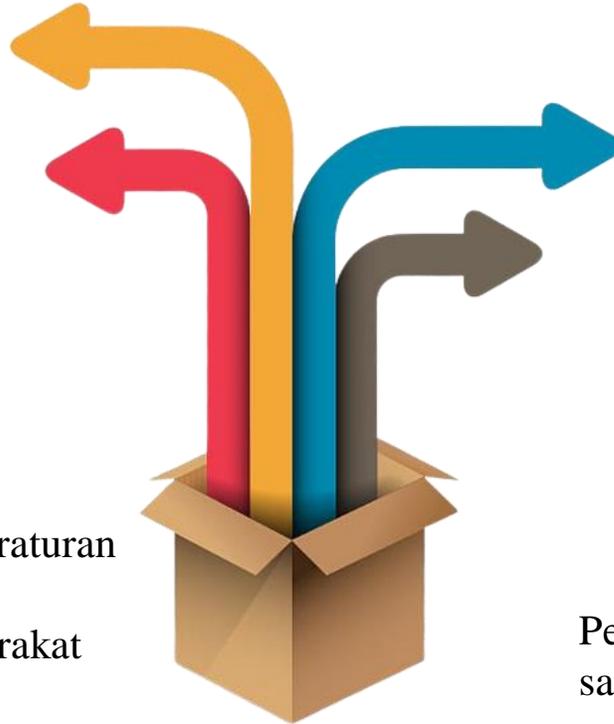
Latar Belakang

Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa, pada sebagian besar masyarakat, pembangunan juga diartikan sebagai perwujudan fisik.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- (2) Menyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa; dan
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa..



Desa

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Desa

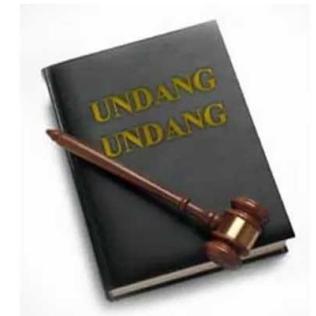
Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa

LATAR BELAKANG

Fungsi-fungsi BPD yang telah dijelaskan tersebut harus dijalankan secara optimal sebagai bentuk kinerja BPD. Secara khusus, konsep kekuasaan telah dijelaskan oleh para ahli seperti: Kinerja oleh Bernadian et al. dalam Sedarmayanti Kinerja didefinisikan sebagai "catatan hasil yang diperoleh dari aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu" "Prestasi adalah keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas."

Laporan lain dari Wibowo dari Pangewa "Hal ini menunjukkan bahwa kinerja memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya mencakup hasil kerja, tetapi juga proses kerja.

Keempat, Murphy dari Pangewa, "Kinerja adalah serangkaian tindakan yang berhubungan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Dari beberapa pandangan tersebut, kinerja didefinisikan sebagai fungsi-fungsi profesional atau kegiatan individu atau kelompok dalam suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini konsep kinerja yang digunakan berdasarkan teori analisis kinerja dari Robbins (2006) yang memiliki 5 indikator antara lain : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, Mandiri.



PENELITIAN TERDAHULU

Lismawati, Murdiansyah Herman, dan Fika Fibriyanita, yang berjudul *“Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan”* Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan sampel atau informan pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Serta Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi dan kinerja BPD Desa Buntu Karau dalam Perencanaan Pembangunan Desa dengan cara melaksanakan hasil musyawarah sehingga memiliki kinerja yang positif dalam pengelolaan dana desa karena BPD selalu mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat untuk aktif mengelola dana desa.

Penelitian dari Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra, Gede Marhaendra Wija Atmaja, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, yang berjudul *“Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan”* Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara keadaan teori dengan fakta hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat masih belum efektif dan harus ditingkatkan lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD masih sama-sama belum maksimal dalam aktivitas kerjanya dan belum menerapkan secara baik dan tersusun.

penelitian dari Sonny Walangitan yang berjudul *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Kanonang II Kabupaten Minahasa. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di desa Kanonang II. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Desa Kanonang II Kabupaten Minahasa dalam peranan BPD dalam Perencanaan Pembangunan belum dikatakan maksimal dalam pencapaiannya, karena banyak munculnya permasalahan terutama dari SDM sendiri.

Permasalahan yang ditemui

Permasalahan yang dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu tersebut juga terjadi di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu, bahwa terdapat rendahnya Kinerja BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu. Berikut adalah beberapa indikator permasalahan

N O	PERMASALAHAN	TARGET	REALISASI
1	Pembangunan jalan paving di lintasan pemukiman sawah yang terbengkalai	100%	40%
2	Saluran irigasi sawah tersumbat	100%	40%
3	Aspirasi masyarakat kurang di respon	100%	30%
4	Kinerja BPD Desa Lambangan kurang optimal	100%	35%



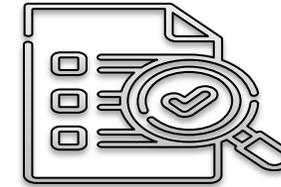
Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator permasalahan dari tahun 2019 hingga 2023 saat ini masih belum ada kemajuan dalam target perencanaan pembangunan dari Kinerja BPD Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan sudah cukup jelas terlihat, dan juga target kedepan sudah dipikirkan. Akan tetapi rendahnya Kinerja BPD Desa Lambangan masih dikatakan belum optimal sepenuhnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Perencanaan Pembangunan Desa Lambangan masih belum jelas kapan bisa mewujudkan harapan dan target untuk kedepannya.

METODE



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif



Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah analisis kinerja BPD dalam perencanaan pembangunan desa.



Lokasi Penelitian

Balai Desa Lambangan Kec. Wonoayu



Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati asal-usul dan adat istiadat setempat, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat Indonesia. Robbins (2006) menjelaskan bahwa Kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerjayang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Yang memiliki 5 indikator yakni :

- 1) Kualitas
- 2) Kuantitas
- 3) Ketepatan Waktu
- 4) Komitmen
- 5) Kemandirian.

Dengan demikian, peneliti mengambil dua variabel yakni Ketepatan Waktu dan Komitmen dari kelima indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian kinerja BPD Desa Lambangan dalam Pembangunan Desa yang akan diuraikan antara lain yakni sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Kualitas

Indikator kualitas dapat diukur melalui persepsi petugas tentang kualitas pekerjaan dan kesempurnaan dalam melakukan tugas, yang mencakup keterampilan dan kemampuan mereka. (Robbins, 2006). Seseorang dapat dinilai berdasarkan kualitasnya. Jika petugas pemerintah desa memiliki kualitas kerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan publik, kinerja mereka akan berjalan dengan baik. Menurut Robbin (2016:260) Sejauh mana tugas diselesaikan dengan sempurna sehubungan dengan keterampilan dan kemampuan karyawan juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas.

Berikut adalah hasil wawancara terkait kualitas yang dibuktikan dalam wawancara pada 2 orang dari RT 01 dan RT 04 yang bernama Pak Koirudin dan Pak Purwanto. *Kesimpulan dari jawaban 2 orang tersebut yang termasuk ketua RT dari RT 01 dan RT 04 bahwa "Kualitas aparatur desa Lambangan terutama kinerja BPD masih belum sempurna sih mas, ya kayak belum maksimal dalam terlibat pembangunan desa Lambangan yang sudah banyan direncanakan tapi belum selesai. Begitupun para warga ya sudah capek untuk berbicara atau tanya tanya tentang kelanjutan pembangunan yang belum selesai sampai saat ini. Ya harapan kami sebagai warga cuma ingin bagaimana kualitas kinerja baik perangkat desa, aparatur desa lainnya, terutama BPD dan Kepala Desa agar menjadikan desa ini semakin maju dan berkualitaslah seperti desa-desa maju lainnya"*.

Dapat disimpulkan bahwa dari pertanyaan dan jawaban dari ketua RT 01 dan 04 dan beberapa tanggapan warga desa Lambangan yang sering terdengar, bahwa Kualitas aparatur desa terutama BPD Desa Lambangan masih belum dikatakan berkualitas. Akan tetapi kerja sama warga juga harus diperhatikan, warga juga harus ikut membantu dalam hal mendukung desa menjadi maju, dan tidak bertindak sesuka hati juga. Warga juga harus bisa memahami kondisi aparatur desa, begitupun aparatur desa juga harus bisa mengayomi warga dengan sebaik mungkin. Permasalahan ini juga menjadi persamaan pada penelitian terdahulu yang juga terjadi pada kualitas kinerja aparatur desa terutama BPD desa yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

B) Kuantitas

Kuantitas dalam kinerja petugas pemerintahan desa terdiri dari jumlah petugas, kegiatan, dan tugas pokok yang harus diselesaikan oleh petugas. Ini dapat digambarkan sebagai jumlah unit, siklus aktivitas, atau kegiatan yang dihasilkan. Setiap desa memiliki rencana operasi dan staf pemerintahan yang menangani tugas-tugas tertentu.

Pada kegiatan pembangunan yang disusun atau direncanakan di Desa Lambangan ada 2 antara lain Pembangunan jalan paving di lintasa sawah dan juga saluran irigasi sawah. Jadi dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa Lambangan, kedua pembangunan infrastruktur ini belum selesai 100%, masih dikatakan dalam realisasi yang belum tuntas. Hal ini menjadi dorongan untuk Kinerja BPD desa Lambangan dalam berupaya mempercepat pembangunan desa ini.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut. Saya sebagai peneliti bertanya “*Menurut Bapak Mulyanto, selaku Kepala Desa Lambangan, dalam menyusun kegiatan atau tugas pokok apakah memiliki jumlah tertentu dalam menyusun kegiatan atau tugas pokok petugas pemerintah desa?*”. Bapak Mulyanto menjawab “*untuk penyusunan kegiatan atau tugas pokok perangkat sendiri sudah sesuai dengan jobdesk, saya biasanya mengikuti hal biasa dengan menentukan program serta tugas pokok yang memang harus diselesaikan, akan tetapi untuk ketentuan jumlahnya tidak bisa dipastikan mas. Tapi ya pasti memang berjumlah, tapi selalu berubah rubah secara kuantitasnya mas, seperti saat ini yang ada dalam perencanaan pembangunan desa ada dua, dan itu masih terealisasi 40-50% lah. Dan masih belum mencapai 100%.*”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan juga penjelasan diatas bahwa sudah dijelaskan terkait Kuantitas menurut teori Robbins(2006) adalah jumlah kegiatan atau jumlah aktivitas yang dilakukan. Dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lambangan bahwa ada dua pembangunan infrastruktur yang masih belum 100% dalam realisasinya. Begitupun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sama sama menggunakan teori Robbins (2006) dalam mengaitkan analisa kinerja BPD kedalam 5 indikator, salah satunya Kuantitas yang memang bertujuan untuk mengetahui jumlah aktivitas yang harus diselesaikan aparatur desa/petugas dengan sebaik mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

C) Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu ialah jumlah tugas yang dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan, ditinjau dari sudut pandang koordinasi dengan hasil output, dan dengan memaksimalkan waktu yang tersedia. (Robbins, 2006). Kedisiplinan terkait dengan ketepatan waktu. Sebagai ujung tombak dalam proses pelayanan publik, segala kegiatan yang membutuhkan waktu dapat diukur oleh petugas pemberi pelayanan publik. Dalam indikator Ketepatan Waktu yang diukur dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tahun 2019 Desa Lambangan sendiri memulai dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal infrastruktur hingga tahun ini masih belum selesai. Berikut adalah data ketepatan waktu dalam beberapa indikator pembangunan desa sebagai berikut :

VARIABEL/INDIKATOR	TARGET PENYELESAIAN	KENYATAAN
Pembangunan Jalan Paving di lintasan pemukiman sawah	2019-2022	2019-2023
Saluran Irigasi Sawah Tersumbat	2019-2022	2019-2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 3, terdapat 2 variabel/indikator dalam pembangunan desa yang tertera dengan target penyelesaian yang seharusnya. Akan tetapi terdapat permasalahan-permasalahan sehingga tidak sesuai dengan target ketepatan waktu yang ditentukan. Seperti pada variabel pertama yaitu Pembangunan jalan paving di lintasan pemukiman sawah di desa Lambangan yang mempunyai target penyelesaian pada awal pembangunan dimulai pada tahun 2019 akhir, dengan target penyelesaian di akhir tahun 2022. Hingga pada kenyataannya, sampai saat ini tahun 2023 masih belum selesai dengan maksimal, karena banyak beberapa permasalahan. Variabel yang kedua yaitu Saluran irigasi Sawah yang masih sering tersumbat, hal ini juga sama dengan variabel pertama. Dalam ketepatan waktu penyelesaiannya juga tidak tepat. Dengan target penyelesaian akhir 2022, hingga sampai saat ini 2023 yang mau diujung akhir tahun masih belum selesai dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada ketua BPD Desa Lambangan Bapak Heru Siswanto. Bapak Heru menjelaskan *“Begini mas, dalam pembangunan infrastruktur ini atau pembangunan jalan paving dan saluran irigasi tersebut direncanakan sudah lumayan lama, dan baru dilaksanakan atau baru dilakukan perbaikan pada tahun 2019 mas. Akan tetapi waktu pandemi covid tahun berapa itu mas kisaran 2020 lah itu kan lumayan lama ya, jadi ya gimana mas soal dana pun kita berkurang, serta banyak kegiatan yang dirumahkan. Dan masih banyak hal hal yang sulit lah pada saat itu. Jadi asal mulanya ga selesai ya karena itu mas sebabnya. Tetapi diusahakan tahun 2023 ini insya allah berjalan cepat lah mas pembangunan yang sudah lama tidak dilanjut ini. Semoga tidak sampai tahun 2024.*

Dapat disimpulkan penjelasan pada indikator ketepatan waktu bahwa menurut ketua BPD desa Lambangan penyebab utama terbengkalainya pembangunan-pembangunan yang sudah dijalankan adalah pada saat pandemi covid 19 di tahun 2020. Dan itu memang istirahat lama dalam aktivitas serta dana dukunganpun juga menurun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah aspirasi masyarakat pada penelitian ini tidak cepat direspon atau ditanggapi. Sedangkan penelitian terdahulu aspirasi masyarakat pun menjadi dukungan dan memberikan semangat sendiri pada aparatur desa serta membantu BPD dalam mewujudkan desa yang maju tanpa menyalahkan sepihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

D) Komitmen

Indikator komitmen berarti seorang pejabat mempunyai komitmen untuk bekerja dengan baik pada instansinya, bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pokoknya dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap instansi dan tempat kerjanya.

Dalam indikator Komitmen yang diukur dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Berkomitmen dalam Pembangunan Desa Lambangan yang diantaranya memperbaiki infrastruktur, memperbaiki saluran irigasi sawah, dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Susunan yang direncanakan sudah berkomitmen dengan Kepala Desa dan perangkat desa serta masyarakat juga.

Terbukti pada hasil wawancara pada Ketua BPD Desa Lambangan Bapak Heru Siswanto, dengan pertanyaan sebagai berikut “*Menurut Bapak Heru sendiri selaku Ketua BPD Desa Lambangan, dalam hal pembangunan desa dengan sesuai komitmen yang sudah dibicarakan, apakah ini benar berjalan sesuai atau bagaimana Pak ? dalam hal komitmen kan harus sudah sesuai jobdesk yang ada ?*”. Bapak Heru menjawab “*Menurut saya pribadi untuk susunan yang direncanakan atau program yang akan dijalankan sudah berkomitmen dengan beberapa orang yang terkait. Terutama Bapak Kepala Desa Lambangan, dan beberapa perangkat yang terkait. Akan tetapi hal komitmen pun bisa jadi tidak sesuai mas, kayak tiba-tiba ada masalah yang terjadi. Seperti tahun kemarin itu adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak rencana pembangunan desa yang masih belum selesai sampai saat ini. Maka dari itu kalau dikatakan komitmen ya komitmen mas hehe, akan tetapi kadang tidak sesuai ekspektasi*”.

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan diatas dengan dibuktikan hasil wawancara bahwa tidak jauh beda dengan indikator ketepatan waktu. Dengan ini indikator komitmen sudah dikatakan berkomitmen. Akan tetapi ada satu penyebab yang dikatakan ketua BPD desa Lambangan yaitu komitmenpun tidak sesuai dikarenakan pandemi covid semua tidak sesuai dengan rencana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini komitmen tidak sesuai, sedangkan penelitian sebelumnya sesuai tanpa adanya penyebab besar yang menjadi masalah utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E) Kemandirian

Kemandirian BPD Desa Lambangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap aparatur yang melayani, khususnya bagi aparatur pemerintah yang berperan menjalankan sistem pemerintahan. kemandirian BPD Desa Lambangan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya mungkin dipengaruhi oleh tingkat kualitas masing-masing pejabatnya. Independensi BPD diwujudkan dalam etos kerja yang tinggi, ditunjukkan dengan menjalankan tugas tanpa dipaksa oleh orang lain.

Hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan wakil BPD Desa Lambangan. *“Menurut Ibu Amina, dalam indikator kemandirian. Apakah tugas BPD sendiri sudah dikatakan mandiri dalam tugas yang terkait yang sudah sesuai dengan tugas pokok BPD itu sendiri, apa masih belum bu?”*. Ibu Amina berkata *“Untuk kemandirian dalam tugas BPD itu kami sudah berusaha mandiri mas dalam hal tugas pokok atau jobdesk yang ditentukan. Akan tetapi dalam perbantuan atau keadaan yang memang kita benar butuh bantuan yang cepat, kita biasanya minta bantuan pada perangkat lain, biar target berjalan cepat sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kalau dikatakan mandiri, kita sudah berusaha mandiri mas dan berusaha menyelesaikan tugas BPD dengan perangkat yang terkait.”*

Dapat disimpulkan dengan penjelasan diatas serta bukti wawancara dengan wakil BPD Desa Lambangan bahwa masih berusaha menegakkan kemandirian dalam ruang lingkup BPD itu sendiri. Akan tetapi, masih banyak aparatur desa yang juga ikut dalam perbantuan tugas BPD walaupun tidak semua. Tetapi masih berusaha membantu tugas BPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama masih ada perbantuan dari aparatur desa lainnya. Kecuali tugas pokok BPD yang memang harus bisa diselesaikan BPD dan juga rekan terkait BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan. BPD juga merupakan lembaga penasihat di tingkat desa, yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertujuan sebagai wadah politik bagi masyarakat desa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya agar pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan misi dan fungsinya.

Dalam penelitian ini konsep kinerja yang digunakan berdasarkan teori analisis kinerja dari Robbins (2006) yang memiliki 5 indikator antara lain : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, Mandiri. Dari 5 indikator tersebut, yang terkait dengan penelitian ini adalah Ketepatan Waktu dan Komitmen. Peneliti mengambil dua variabel yakni Ketepatan Waktu dan Komitmen dari kelima indikator tersebut sebagai dimensi dalam penelitian kinerja BPD Desa Lambangan dalam Pembangunan Desa yang akan diuraikan antara lain yakni Ketepatan Waktu dan Komitmen. Dalam indikator Ketepatan Waktu yang diukur dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tahun 2019 Desa Lambangan sendiri memulai dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal infrastruktur hingga tahun ini masih belum selesai. Sedangkan Dalam indikator Komitmen yang diukur dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Berkomitmen dalam Pembangunan Desa Lambangan yang diantaranya memperbaiki infrastruktur, memperbaiki saluran irigasi sawah, dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Susunan yang direncanakan sudah berkomitmen dengan Kepala Desa dan perangkat desa serta masyarakat juga. Tetapi dalam berkomitmen banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga komitmen dalam pembangunan masih banyak yang belum terselesaikan dengan tepat waktu.

REFERENSI

- Nurcholiz, D. T. (n.d.). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka.
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dwi Agus Pratiwi, M. T. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Taliziduhu. (2001). *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Suhadi. (2007). *Jurnal Hukum - pandecta*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sedarmayanti (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT.Refika Aditama
- Sutrisno Eyd. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana
- Wibowo (2013). *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta
- Pangewa, Maharuddin (2013). *Pengaruh Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja*. Makassar : Badan Penerbit UNM
- Robbins, S. P. (2006). *Indikator Kinerja Karyawan*.
- Lismawati, M. H. (2021). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. *Uniska*.
- Yoga Adnyana Putra, A. A. (2019). ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PEMOGAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN. *Journal Ilmu Hukum - Kertha Negara*.
- Walangitan, S. (n.d.). PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Suatu Studi Di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



TERIMA KASIH

